



**Proceeding of Conference on Law and Social Studies**

<https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

**Held in Madiun on October 18<sup>th</sup> 2024**

**e-ISSN: 2798-0103**

**OPTIMALISASI POLITICAL EDUCATION  
MELALUI IMPLEMENTASI KRPPA  
MENJELANG PILKADA SERENTAK DI KOTA  
MADIUN**

Siska Diana Sari<sup>1</sup>, Nizam Zakka Arrizal<sup>1</sup>, Sulistya Evingrum<sup>1</sup>,  
Bintang Ulya Kharisma<sup>1</sup>, Yudita Ayu Widya Perdana<sup>1</sup>, Rara  
Aa'nisaa<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas PGRI Madiun, email [siskadianasari@unipma.ac.id](mailto:siskadianasari@unipma.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendidikan politik melalui program Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak menjelang Pilkada serentak di Kota Madiun. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan partisipasi pemilih meningkat dan kesadaran politik masyarakat menjadi lebih baik. Latar belakang penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama menjelang Pilkada. Fokus pada Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak sebagai wadah untuk menyebarluaskan informasi politik menjadi kunci dalam penelitian ini. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemilih pemula, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan untuk memberikan pemahaman tentang proses pemilu dan pentingnya suara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mengalami peningkatan kesadaran politik dan pemahaman tentang hak suara, serta partisipasi aktif dari kalangan pemilih pemula dan perempuan dalam kegiatan politik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa program Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak (KRPPA) efektif dalam mengoptimalkan pendidikan politik, yang diharapkan dapat meminimalisir angka golput dan menciptakan pemilih yang cerdas dan kritis serta menjadi acuan untuk pengembangan program KRPPA di kelurahan lain untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dan penguatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan politik.

**Kata kunci:** Edukasi Politik, KRPPA, Pilkada

<b>Abstract</b>	<p><i>The research was intended to optimize political education through the feminine and child welfare programs ahead of the simultaneous elections in madiun city. By involving the public, it is expected that voting participation increases and the political consciousness of the people becomes better. This study emphasized the importance of political education in boosting community participation, especially toward the election. Focusing on the friendly health of women and children as a container for propagating political information has been the key to the study. The methodology used is an empirical law approach by involving various elements of society, including novice voters, through socialization and counseling activities to provide an understanding of election processes and the importance of voice. Studies have shown that communities have increased political awareness and understanding of voting rights, as well as the active participation of young voters and women in political activities. The conclusion of the study is that the friendly health of women and children (krppa) programs are effective in leveraging political education, which is expected to minimize golput and create smart and critical voters and be a model for the development of krppa programs in other countries to reach more people and improve the cooperation between government and society in conducting political education.</i></p> <p><b>Keywords:</b> Political Education, KRPPA, Pilkada</p>
-----------------	---

## **1. Pendahuluan**

Pilkada merupakan salah satu mekanisme demokrasi yang penting di Indonesia. Setiap Warga yang tinggal di suatu Negara, harus memiliki Hak-hak warga negara yang di atur negara meliputi:

- Hak untuk hidup
- Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
  - Hak mengembangkan diri
  - Hak memperoleh keadilan
  - Hak atas kebebasan pribadi
  - Hak atas rasa aman
  - Hak atas kesejahteraan
  - Hak turut serta dalam pemerintahan
  - Hak wanita
  - Hak anak

Pada poin (h) dijelaskan bahwa Negara memberikan pengakuan kepada setiap warga Negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yakni adanya hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih.

Hak memberikan suara atau memilih merupakan hak yang harus dimiliki setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.”, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”, dan Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi: “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”. Kemudian menurut Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lalu Pasal 43 ayat (1) UU menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. Dari Peraturan-Peraturan di atas menegaskan bahwa Negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia.

Pilkada serentak tahun 2024 merupakan bagian dari pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak. Saat itulah Masyarakat berhak menggunakan hak pilih nya untuk memilih pemimpin yang tepat dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik, akan tetapi semua itu tidak mudah untuk dilaksanakan. Setiap daerah pasti akan menghadapi dinamika politik di daerahnya masing-masing. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Madiun meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun ini menghadapi dinamika politik yang kompleks, seperti fenomena perilaku pemilih <sup>1</sup> yang berubah dan tingginya biaya politik.<sup>2</sup> Hal ini sangat mempengaruhi jalan nya demokrasi yang sehat karena masih banyak nya kasus suap untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan dengan dalih “minta dukungan” dan lainnya. Target utamanya adalah Keluarga yang menengah kebawah terutama ibu rumah tangga, dikarenakan harga bahan pokok yang naik. Dari sini lah awal mula peneliti terinspirasi untuk melakukan penelitian, agar pemahaman politik untuk perempuan dapat meningkat. Menurut data statistik di web resmi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Madiun, yang menunjukkan bahwa dari total 154.959 suara yang tercatat, sebanyak 79.942 suara atau lebih dari separuhnya berasal dari perempuan. Jumlah ini melebihi pemilih laki-laki yang tercatat sebanyak 75.017 suara.<sup>3</sup> Pemilih pemula adalah

---

<sup>1</sup> papayan.desa.id, *Menciptakan Ekosistem Politik Yang Ramah Perempuan Di Desa Papayan*. (2024, 28 September).

Diakses pada 30 Desember 2024, dari <https://www.papayan.desa.id/menciptakan-ekosistem-politik-yang-ramah-perempuan-di-desa-papayan/>

<sup>2</sup> bratapos.com. *Analisis Pilkada Kota Madiun 2024, Strategi Petahana Dan Dinamika Politik*. <https://www.bratapos.com/read/analisis-pilkada-kota-madiun-2024-strategi-petahana-dan-dinamika-politik>. (2024, 23 Mei).

<sup>3</sup> Fauzan Nanda Pratama, “Menurut Data DPS, Kota Madiun Didominasi Pemilih

mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun Pemilihan presiden.<sup>4</sup> Peran perempuan dalam Pilkada ini sangat krusial,<sup>5</sup> mengingat partisipasi mereka di politik masih rendah.<sup>6</sup> Sosialisasi tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik diadakan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka. Disebabkan meningkatnya tantangan kesetaraan gender, maka dengan dilakukannya political education untuk Perempuan, diharapkan para perempuan dapat berkontribusi lebih signifikan dalam proses politik dan pengambilan keputusan di daerah mereka.<sup>78</sup>

---

Perempuan”, (<https://rri.co.id/pilkada-2024/949099/menurut-data-dps-kota-madiun-didominasi-pemilih-perempuan>, di akses 1 januari 2024)

<sup>4</sup> UU Pilpres, 2008: 7.

<sup>5</sup> [madiunkab.go.id](https://madiunkab.go.id). Siapkan Pilkada 2024 Aman, Pemkab Madiun Gelar Rakor Bersama Forkopimda. <https://madiunkab.go.id/siapkan-pilkada-2024-aman-pemkab-madiun-gelar-rakor-bersama-forkopimda/>, (2024, 12 September ).

<sup>6</sup> [analisaberita.madiunkota.go.id](https://analisaberita.madiunkota.go.id). Analisa Berita Kota Madiun. dari <https://analisaberita.madiunkota.go.id/detail/7509>, (2024, 14 Maret).

<sup>7</sup> [dp3ap2kb.jogjakota.go.id](https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id). (2024, 28 Juni). Sosialisasi Kelurahan Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Kelurahan Brontokusuman. <https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/detail/index/34201>

<sup>8</sup> [papayan.desa.id](https://papayan.desa.id), *Menciptakan Ekosistem Politik Yang Ramah Perempuan Di Desa Papayan*. (2024, 28 September).

Diakses pada 30 Desember 2024, dari <https://www.papayan.desa.id/menciptakan-ekosistem-politik-yang-ramah-perempuan-di-desa-papayan/>

## **II. Metode Penelitian**

Menurut Dr. Bintan R. Saragih dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Hukum Empiris, penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan data empiris atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau pengukuran dalam situasi nyata untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Data empiris yang digunakan dapat berupa data kuantitatif (angka) atau data kualitatif (deskripsi atau gambaran). Pada penelitian empiris, hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk menemukan konsep-konsep mengenai proses terjadinya hukum dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam Masyarakat.

Metode penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Metode Penelitian Hukum Empiris dapat dilakukan dengan observasi langsung untuk memantau aktivitas dan interaksi masyarakat terkait dengan edukasi politik dan implementasi KRPPA menjelang pilkada serentak di Kota Madiun, Kemudian Wawancara dengan tokoh-tokoh penting seperti pejabat lokal, anggota komunitas, dan peserta KRPPA untuk memperoleh informasi detail tentang implementasi KRPPA dan efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran politik. Survei yang dilakukan

untuk memahami persepsi masyarakat tentang edukasi politik dan implementasi KRPPA. Hal ini membantu dalam identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya adalah melakukan studi kasus yang berfokus pada contoh-contoh konkret di mana KRPPA telah berhasil meningkatkan kesadaran politik dan apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi efektivitasnya. Serta melakukan validasi data untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Bisa melibatkan verifikasi data dengan sumber-sumber independen dan cross-checking dengan informan-informan yang relevan.

### **III. Hasil Pembahasan**

#### **1. Political Education**

Political education adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman individu tentang politik, hak, dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Proses ini mencakup berbagai metode, seperti kurikulum sekolah, program komunitas, dan pengalaman praktis, yang semuanya dirancang untuk mendorong partisipasi aktif dalam proses politik. Tujuan dari political education adalah untuk meningkatkan kesadaran politik, mempersiapkan pemilih dengan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat saat memilih, mengembangkan keterampilan berpikir kritis untuk mengevaluasi informasi dan argumen politik, serta mendorong individu untuk terlibat dalam kegiatan politik seperti pemungutan suara dan diskusi publik. Pembahasan menjabarkan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji oleh penulis dalam penelitian, hasil hipotesis, analisis terhadap objek penelitian, ide atau gagasan yang merupakan pokok pikiran dari penulis, dan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### Tahap-Tahap Political Education :

- 1) Pengenalan: Pada tahap ini, individu diperkenalkan dengan konsep dasar politik. Ini mencakup pemahaman tentang sistem pemerintahan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta isu-isu sosial yang relevan. Pendidikan di tahap ini sering dilakukan di sekolah melalui kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Misalnya, siswa belajar tentang konstitusi, pemilihan umum, dan peran lembaga-lembaga pemerintah.
- 2) Pemahaman: Setelah pengenalan, individu mulai memahami lebih dalam tentang struktur politik dan proses yang ada. Ini bisa melibatkan diskusi, analisis kasus, dan pembelajaran tentang sejarah politik. Di tahap ini, individu diajarkan untuk menganalisis isu-isu politik yang sedang berlangsung dan memahami bagaimana kebijakan dibuat dan diterapkan.
- 3) Keterlibatan: Pada tahap ini, individu didorong untuk terlibat secara aktif dalam proses politik. Ini bisa berupa partisipasi dalam pemilu, menjadi relawan dalam kampanye, atau terlibat dalam organisasi masyarakat sipil. Keterlibatan ini penting untuk membangun rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap proses demokrasi.
- 4) Refleksi dan Evaluasi: Individu diajak untuk merefleksikan pengalaman mereka dalam keterlibatan politik dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka. Ini penting untuk memahami efektivitas partisipasi mereka dan untuk mengembangkan sikap kritis terhadap proses politik. Refleksi ini dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, penulisan esai, atau presentasi.

#### Teori-Teori Political Education :

- a. Teori Kritis: Teori ini menekankan pentingnya berpikir kritis dan analisis terhadap struktur kekuasaan dalam masyarakat. Pendidikan politik harus mendorong individu untuk mempertanyakan norma-norma yang ada dan memahami bagaimana kekuasaan beroperasi. Paulo Freire dalam bukunya *Pedagogy of the Oppressed* (1970) menekankan bahwa pendidikan harus bersifat dialogis dan memberdayakan individu untuk menjadi agen perubahan.
- b. Teori Keterlibatan: Teori ini berfokus pada pentingnya keterlibatan aktif dalam proses politik. Robert D. Putnam dalam *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (2000) menjelaskan bahwa keterlibatan sosial dan politik sangat penting untuk kesehatan demokrasi. Pendidikan politik harus mendorong individu untuk tidak hanya memahami politik, tetapi juga berpartisipasi di dalamnya.<sup>9</sup>
- c. Teori Sosialisasi Politik: Teori ini menjelaskan bagaimana individu belajar tentang politik melalui interaksi dengan keluarga, teman, media, dan institusi pendidikan. Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* (1963) menunjukkan bahwa sosialisasi politik membentuk pandangan politik dan perilaku individu, yang sangat penting untuk partisipasi dalam demokrasi.
- d. Teori Pembelajaran Sosial: Teori ini menekankan bahwa individu belajar dari pengamatan dan pengalaman sosial. Albert Bandura dalam *Social Learning Theory* (1977) menjelaskan bahwa individu dapat belajar tentang partisipasi politik melalui pengalaman langsung dan

---

<sup>9</sup> Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*. Hal 91.

interaksi dengan orang lain. Ini menunjukkan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran aktif.<sup>1011</sup>

## **2. KRPPA**

Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak (KRPPA) adalah Kelurahan yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah kota, pembangunan kelurahan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia. Program ini diselenggarakan di seluruh kelurahan di Indonesia secara bertahap dan disesuaikan dengan potensi kelurahan, kondisi wilayah, sosial budaya dan prioritas program kelurahan. program ini bekerjasama dengan Dinas sosial PPPA.

Tujuan adanya program ini untuk memberdayakan perempuan dan anak dikarenakan masih banyaknya tingkat kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak. Apalagi di lingkup Politik, jumlah partisipan perempuan masih sedikit dan pemahaman akan dunia politik masih minim. Maka dari itu salah satu tujuan Program KRPPA adalah mengedukasi para Perempuan untuk ikut berpartisipasi di dunia politik. Perempuan menjadi sasaran utama bagi para kandidat pilkada, dikarenakan perempuan lebih mudah untuk diprovokasi apalagi perempuan yang tidak paham akan dunia politik. Masih maraknya money laundry dengan dalih "minta doa" dll untuk mendapatkan suara yang

---

<sup>10</sup> ALMOND, G. A., PATTERNS OF PARTISANSHIP, *In The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* (pp. 123–160), Princeton University Press, <http://www.jstor.org/stable/j.ctt183pnr2.8>.

<sup>11</sup> Deri Firmansyah, "Social Learning Theory: Cognitive and Behavioral Approaches", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik* Vol.1, No.3, (2023) 299.

banyak. Rata-rata targetnya adalah orang-orang menengah ke bawah terutama ibu rumah tangga karena saat pilkada harga bahan pokok pasti naik dan itu bisa dimanfaatkan oleh kandidat ini. selain itu para remaja juga menjadi target, ini dikarenakan mereka masih labil dalam mengambil keputusan dan maraknya FOMO (Fear Of Missing Out) atau ikut-ikutan teman nya dalam memilih. padahal Tahun ini suara terbanyak dipegang oleh para remaja ini atau di sebut Gen Z, Hal ini sangat mempengaruhi dinamika politik Di Indonesia. Oleh karena itu pentingnya pendidikan politik bagi perempuan untuk meningkatkan peran perempuan di dunia politik melalui program KRPPA ini.

Di Madiun ada 5 Kelurahan yang dijadikan Pilot Project untuk Program KRPPA yaitu Kelurahan Mojorejo, Kuncen, Winongo, Oro-Oro Ombo, dan Klegen. Program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) berperan penting dalam pendidikan politik dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Melalui sosialisasi dan pelatihan, KRPPA mendukung pemberdayaan perempuan untuk memahami hak-hak politik mereka dan terlibat aktif dalam proses politik. Sehingga akan menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi perempuan untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan anak

### **3. Optimalisasi Political Education Melalui Implementasi KRPPA Menjelang Pilkada Serentak di Kota Madiun**

Pendidikan politik bagi perempuan harus jelas terfokus pada kemampuan perempuan untuk menyadari pentingnya emansipasi perempuan terhadap marginalisasi politik

nasional, sehingga perempuan memiliki identitas yang kuat dalam kehidupan politik. Tujuan pendidikan politik perempuan adalah untuk membebaskan perempuan dari perlakuan tidak setara, bukan untuk mencari kekuasaan atau kendali. Dengan melakukan Upaya seperti Sosialisasi tentang pentingnya pemahaman politik bagi Perempuan, Mengadakan program pelatihan untuk pengembangan keterampilan kepemimpinan bagi perempuan, sehingga mereka lebih siap untuk terlibat dalam politik, memanfaatkan platform media social untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi Perempuan tentang hak-hak politik, serta menjalin Kerjasama dengan organisasi pemberdayaan Perempuan untuk memperluas jangkauan dan dampak program Pendidikan politik. Program ini merupakan hasil kerjasama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) dan akademisi, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi perempuan dan anak-anak. Melalui program ini, kelima kelurahan tersebut akan melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak, serta pentingnya partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Selain itu, program KRPPA juga akan melibatkan masyarakat dalam forum-forum diskusi dan musyawarah, sehingga suara perempuan dan anak dapat didengar dan diperhatikan dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan dukungan dari akademisi, program ini diharapkan dapat menghasilkan penelitian dan evaluasi yang mendalam mengenai dampak dari inisiatif ini, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Diharapkan bahwa

keberhasilan program KRPPA di kelima kelurahan ini dapat menjadi contoh keberlanjutan bagi 27 kelurahan lainnya di Madiun. Dengan menunjukkan dampak positif dari inisiatif ini, diharapkan akan ada adopsi praktik terbaik dan pengembangan kebijakan yang lebih inklusif di seluruh kota. Melalui model ini, Kota Madiun dapat menjadi pionir dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, berdaya, dan peduli terhadap perempuan dan anak, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan.

#### **IV. Simpulan dan Saran**

##### **Simpulan**

Menjabarkan hasil pokok dari penelitian yang dilakukan penulis. Simpulan disusun dalam bentuk paragraf.

Saran menjabarkan masukan atau usulan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Saran disusun dalam bentuk paragraf.

Kesimpulan dari teks tersebut adalah bahwa pendidikan politik memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi individu, khususnya perempuan, dalam proses politik. Melalui program Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak (KRPPA), diharapkan perempuan dapat diberdayakan untuk memahami hak-hak politik mereka dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Program ini mencakup berbagai tahap, mulai dari pengenalan konsep politik hingga keterlibatan aktif dan refleksi. Selain itu, teori-teori pendidikan politik, seperti teori kritis dan teori keterlibatan, mendukung pentingnya pendidikan yang mendorong analisis kritis dan partisipasi aktif. Dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi dan pelatihan, KRPPA bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung, serta memberikan

dampak positif bagi perempuan dan anak di tingkat lokal. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kelurahan lain dan mendorong pengembangan kebijakan yang lebih adil dan berdaya.

**Saran :**

Penting untuk mengembangkan kurikulum pendidikan politik yang komprehensif di sekolah dan institusi pendidikan, mencakup pemahaman mendalam tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara serta isu-isu sosial yang relevan. Program KRPPA sebaiknya mengadakan pelatihan keterampilan kepemimpinan khusus untuk perempuan agar mereka merasa lebih percaya diri dan siap berpartisipasi dalam politik. Selain itu, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang hak-hak politik dan pentingnya partisipasi perempuan dapat menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Mendorong pembentukan forum diskusi di tingkat kelurahan yang melibatkan perempuan dan anak sehingga membantu memastikan suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi dengan organisasi pemberdayaan perempuan juga penting untuk memperluas jangkauan program dan meningkatkan dampaknya. Melakukan evaluasi berkala terhadap program KRPPA untuk mengukur dampaknya dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki sangat dianjurkan. Selain itu, kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan politik dan partisipasi perempuan dalam proses politik dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan kegiatan komunitas lainnya. Terakhir, mengembangkan program khusus untuk mendidik dan memberdayakan remaja, terutama Gen Z, agar mereka memahami pentingnya keterlibatan politik dan dapat membuat keputusan yang informasional saat memilih juga sangat

penting. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pendidikan politik dapat lebih efektif dalam memberdayakan perempuan dan anak, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam proses politik di tingkat lokal dan nasional.

## **V. Ucapan Terima Kasih**

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penelitian Dana Internal UNIPMA tahun 2024, yang telah memberikan dukungan dana dan sumber daya yang sangat berharga dalam penelitian hibah LPPM Tahun 2024 “Analisis Implementasi Kelurahan Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Sebagai Wujud Pembangunan Berbasis Gender Mainstreaming Di Kota Madiun” dengan Skema Penelitian-penelitian Payung Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI MADIUN. Tanpa bantuan tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

Kami juga berterima kasih kepada Dinas Sosial PPPA atas masukan, dan dukungan selama proses penelitian. Kerjasama dan dedikasi Anda sangat berarti bagi kami. Selain itu, kami menghargai semua responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Tanpa partisipasi Anda, hasil penelitian ini tidak akan mungkin tercapai. Semoga kerjasama dan dukungan ini dapat terus berlanjut di masa mendatang.

## Daftar Pustaka

- ALMOND, G. A., & VERBA, S. (1963). PATTERNS OF PARTISANSHIP. In *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* (pp. 123–160). Princeton University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt183pnr2.8>.
- Analisisberita.madiunkota.go.id. (2024, 14 Maret). *\_Analisa Berita Kota Madiun*. Diakses pada 31 Desember 2024, dari <https://analisisberita.madiunkota.go.id/detail/7509>
- Bratapos.com. (2024, 23 Mei). *Analisis Pilkada Kota Madiun 2024, Strategi Petahana Dan Dinamika Politik*. Diakses pada 30 Desember 2024, dari <https://www.bratapos.com/read/analisis-pilkada-kota-madiun-2024-strategi-petahana-dan-dinamika-politik>.
- Deri Firmansyah, “Social Learning Theory: Cognitive and Behavioral Approaches”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik* Vol.1, No.3, (2023) 299.
- Dinsos.madiunkota.go.id. (2024, 24 Juli). *\_Pentingnya Perempuan Melek Politik, Dinsos PPPA Adakan Sosialisasi Perempuan Di Bidang Politik*. Diakses pada 31 Desember 2024, dari <https://dinsos.madiunkota.go.id/2024/07/24/pentingnya-perempuan-melek-politik-dinsos-pppa-adakan-sosialisasi-perempuan-di-bidang-politik/Webpage>
- dp3ap2kb.jogjakota.go.id. (2024, 28 Juni). *\_Sosialisasi Kelurahan Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Kelurahan Brontokusuman*. Diakses pada 30 Desember 2024, dari <https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/detail/index/34201>.
- Fauzan Nanda Pratama, “Menurut Data DPS, Kota Madiun Didominasi Pemilih Perempuan”, (<https://rri.co.id/pilkada-2024/949099/menurut-data-dps-kota-madiun-didominasi-pemilih-perempuan>, di akses 1 januari 2025) .
- Freire, Paulo. 1971. *Pedagogy of the Oppressed*. The Continuum International Publishing Group Inc 15 East 26” Street, New York, NY 10010.
- madiunkab.go.id. (2024, 12 September ). *Siapkan Pilkada 2024 Aman, Pemkab Madiun Gelar Rakor Bersama Forkopimda*. Diakses pada 31 Desember 2024, dari <https://madiunkab.go.id/siapkan-pilkada-2024-aman-pemkab-madiun-gelar-rakor-bersama-forkopimda/>.
- papayan.desa.id. (2024, 28 September). *Menciptakan Ekosistem Politik Yang Ramah Perempuan Di Desa Papayan*. Diakses pada 30 Desember 2024, dari <https://www.papayan.desa.id/menciptakan-ekosistem-politik-yang-ramah-perempuan-di-desa-papayan/>.

rri.co.id. (2024, 1 September). \_Bawaslu Kota Madiun Menggelar Sosialisasi Peran Perempuan dalam Pilkada 2024.\_ Diakses pada 30 Desember 2024, dari <https://www.rri.co.id/pilkada-2024/946237/bawaslu-kota-madiun-menggelar-sosialisasi-peran-perempuan-dalam-pilkada-2024>

Undang-Undang Pemilihan Presiden, 2008: 7.

uptjurnal.umsu.ac.id. (2024, 18 September). \_Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Diakses pada 31 Desember 2024, dari <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>: Pengertian Penelitian Hukum Empiris Secara sederhana penelitian hukum empiris, bekerjanya hukum di dalam Masyarakat